

CAMPUS DATA INSIGHT

**Mendorong Mahasiswa Menjadi
Pelopor Literasi Data**

SEPTEMBER 2026

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menempatkan data sebagai aset strategis di tengah akselerasi digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam paradigma pembangunan berbasis bukti, data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi penting agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkannya, Pemerintah Provinsi Kaltara memperkuat tata kelola data melalui kolaborasi antara Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Sepanjang 2025, pembinaan Satu Data dilaksanakan kepada OPD, termasuk verifikasi 172 kegiatan statistik bersama BPS untuk memastikan pemenuhan standar data. Pemerintah Provinsi Kaltara memperkuat tata kelola data melalui mekanisme kerja Forum Satu Data bersama tim pendamping yang secara konsisten membina 3–5 OPD sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Memasuki 2026, fokus penguatan Satu Data tidak lagi sekadar mengumpulkan data, tetapi meningkatkan kualitas dan pemanfaatannya. Proses pengumpulan data mulai dilakukan bersamaan dengan penyusunan metadata, sehingga kualitas data dapat dibangun sejak awal. Hingga tahap ini, sekitar 50 persen metadata telah dirumuskan OPD. Proses tersebut menjadi dasar penetapan 1.670 dataset sektoral dan 85 dataset geospasial dalam Daftar Data Tahun 2026, yang didukung penyusunan Pedoman Pelaksanaan Satu Data Daerah sebagai acuan bersama pengelolaan data.

Namun, BPS menilai kultur data tidak bisa tumbuh hanya di lingkungan birokrasi, tetapi dibutuhkan ekspansi strategis ke luar tembok pemerintahan. Kampus dipandang sebagai mitra kunci untuk memutus rantai asumsi di ruang publik dan menggantinya dengan diskursus berbasis data yang valid.

Merespons kebutuhan tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltara bersama BPS menghadirkan Campus Data Insight (CDI) bekerja sama dengan Universitas Kalimantan Utara (Unikaltar). Program ini dirancang untuk menyiapkan generasi akademisi yang “melek data” dan mampu berkontribusi dalam Sistem Statistik Nasional (SSN) sebagai penjaga kualitas kebijakan publik pada masa depan.

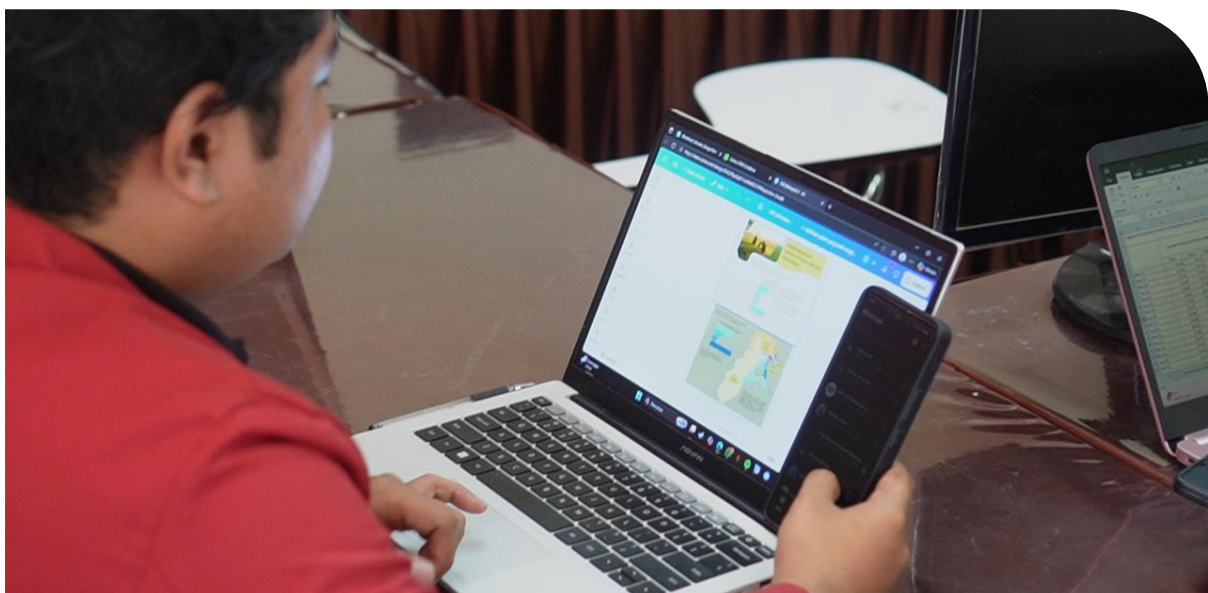


Better Data, Better Life: Menanam Kultur Data Melalui Kampus



Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi implementasi Satu Data di Kalimantan Utara melalui peluncuran portal Satu Data Daerah, yaitu Portal E-Dataku (Sidara Cantik), sebagai upaya transparansi publik. Platform ini memungkinkan masyarakat mengakses data pembangunan secara lebih terbuka dan dinamis, sekaligus menegaskan komitmen terhadap keterbukaan informasi.

Pengembangannya tidak berhenti pada penyediaan portal. Memasuki 2026, E-Dataku terus diperkuat agar mampu menjadi pusat data yang terintegrasi. Hingga awal Agustus 2026, portal E-Dataku telah memuat 4.606 *dataset*, yang terdiri atas 1.882 *dataset* provinsi dari 40 OPD dan 2.724 *dataset* dari tiga kabupaten/kota. Portal ini juga telah menyediakan data afirmatif pendidikan yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik).



Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, data yang dipublikasikan harus memenuhi prinsip akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam peran sebagai walidata, DKISP Provinsi Kaltara, yang didukung Bapperida selaku Sekretariat Satu Data dan BPS sebagai pembina data, memastikan kualitas tersebut melalui proses verifikasi ketat terhadap ratusan kegiatan statistik sektoral sebelum dipublikasikan melalui portal.

Di titik inilah tantangan berikutnya muncul. Data yang tersedia berisiko menjadi “arsip digital” semata jika tidak diiringi kapasitas pengguna untuk membaca, mengolah, dan menarik makna kebijakan. Karena itu, CDI diposisikan sebagai akselerator literasi data, dengan mahasiswa dan dosen sebagai target strategis. Mereka diharapkan menjadi pengguna aktif E-Dataku sekaligus agen yang mendorong kebijakan berbasis bukti.

Pengembangan E-Dataku juga mulai diarahkan untuk memperkuat data tematik yang mendukung pembangunan inklusif. Pemerintah daerah mulai mengidentifikasi data afirmatif pendidikan dari Dapodik dan Education Management Information System (EMIS), sekaligus menyiapkan mekanisme pendataan penyandang disabilitas yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Kalimantan Utara (SIJOSKU) dan E-Dataku. Langkah ini diharapkan memperkuat ketersediaan data bagi penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan.

“Campus Data Insight bertujuan menjembatani kesenjangan tersebut,” ujar Kepala BPS Provinsi Kaltara Mas’ud Rifai.



“Kami ingin mahasiswa tidak hanya melihat data, tetapi memahaminya sebagai alat untuk membedah masalah sehari-hari dan merumuskan solusi pembangunan.”

Mas’ud Rifai
Kepala BPS Provinsi Kaltara

CDI berakar pada filosofi statistik global “Better Data, Better Life”, gagasan bahwa kualitas hidup akan meningkat jika pembangunan bertumpu pada data yang kuat. Visi ini, menurut Mas’ud, tidak mungkin dipikul hanya oleh BPS atau pemerintah daerah, tetapi perlu dibagi bersama mitra strategis, terutama kampus dan akademisi. proficient at reading tables, but rather to inculcate a critical mindset so that evidence-based policy becomes an institutionalised practice.

Program yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Kaltara bersama BPS dan Unikaltar ini mendorong mahasiswa dan dosen tidak hanya menjadi pengguna data, tetapi juga mampu membaca metadata, mengolah informasi, dan menerjemahkannya menjadi analisis yang relevan bagi pembangunan daerah. Dengan demikian, data yang tersedia di E-Dataku tidak berhenti sebagai arsip digital, tetapi menjadi dasar diskusi dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

Mas'ud juga menyoroti diskursus publik yang kerap didominasi asumsi, misalnya perdebatan tentang pengangguran atau kemiskinan yang bertumpu pada pengamatan sepintas, bukan indikator terukur. Melalui CDI, BPS mendorong ruang publik yang lebih sehat: argumentasi berbasis bukti, perdebatan lebih produktif, dan rekomendasi lebih solutif. Target akhirnya bukan sekadar mahasiswa yang mahir membaca tabel, melainkan terbentuknya mindset kritis sehingga evidence-based policy menjadi praktik yang membudaya.

Pandangan ini sejalan dengan peran perencanaan daerah. Kepala Bapperida Provinsi Kaltara, Bertius, menekankan bahwa bagi lembaga perencanaan, data adalah fondasi utama dalam setiap proses kebijakan.



Ia menambahkan bahwa CDI membantu menjembatani kebutuhan pemerintah daerah dengan kapasitas akademik.

“Kami sebagai pengguna data sangat terbantu ketika kampus mulai memahami bagaimana membaca metadata, memahami sumber data, dan mengolahnya menjadi bahan analisis. Itu membuat dialog antara pemerintah dan akademisi menjadi lebih setara dan berbasis bukti,” tuturnya.

Memperkuat Sistem Statistik Nasional dari Kampus

Program ini tidak berhenti pada pelatihan di ruang kelas. Sejak awal pelaksanaan Campus Data Insight, mahasiswa mulai mengolah data statistik sektoral menjadi infografis yang memudahkan publik memahami “cerita di balik angka”. Infografis ini menjadi jembatan antara data teknis dan kebutuhan komunikasi kebijakan. Hasilnya, data tampil lebih ringkas, lebih tajam, dan lebih siap dipakai untuk diskusi lintas pemangku kepentingan, baik di kampus maupun di lingkup pemerintah daerah.

Selain itu, CDI menghasilkan penguatan diskursus pembangunan berbasis bukti melalui artikel yang ditulis mahasiswa. Tulisan-tulisan ini mengangkat isu pembangunan Kalimantan Utara dengan pijakan data yang terukur, sehingga perdebatan publik tidak lagi bertumpu pada asumsi atau observasi sepintas. Di sini, mahasiswa berperan sebagai “penerjemah” data dengan menghubungkan indikator statistik dan realitas sosial, sekaligus menyajikan argumentasi yang lebih terstruktur, solutif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Sriwati, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan Bapperida Kaltara, literasi data di kalangan mahasiswa memberikan dampak langsung pada kualitas diskursus pembangunan.

Inisiatif lain dalam program CDI adalah penetapan mahasiswa sebagai “duta data”. Para mahasiswa ini tidak hanya menjadi penggerak literasi data di lingkungan kampus, tetapi sebagian juga dilibatkan dalam program magang. Tidak hanya menjadi agen literasi di lingkungan kampus, para duta data dilibatkan sebagai fasilitator pendamping dalam berbagai kegiatan Satu Data. Model peer learning ini terbukti mempercepat proses verifikasi metadata sekaligus memperkuat interaksi antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan BPS.



Skema magang ini penting karena mempertemukan kapasitas analitis kampus dengan kebutuhan tata kelola Satu Data Daerah di Provinsi Kaltara. Dengan begitu, mahasiswa mendapat pengalaman nyata tentang bagaimana data dikelola, diverifikasi, serta digunakan dalam siklus perencanaan dan evaluasi pembangunan. Saat ini, lima mahasiswa duta data sedang menjalani magang di berbagai OPD teknis di Provinsi Kaltara, seperti DKISP dan Bapperida.

Rektor Unikaltar Didi Andriansyah menyambut baik inisiatif ini.

“Program ini memberikan insight baru. Mahasiswa kini memahami bagaimana menerjemahkan data menjadi sinyal-sinyal pembangunan. Ini selaras dengan semangat Tridharma Perguruan Tinggi, di mana riset kampus harus berkontribusi pada penyelesaian masalah daerah.”

Didi Andriansyah
Rektor Unikaltar



Untuk menjaga keberlanjutan program, Pemerintah Provinsi Kaltara bersama BPS dan Unikaltar juga tengah menyiapkan modul pembelajaran Sekolah Data sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Program ini dirancang menghadirkan mentor dari BPS, pemerintah daerah, dan praktisi data agar literasi data dapat terus berkembang di lingkungan kampus.

Menuju Budaya Data yang Berkelanjutan



Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, peluncuran E-Dataku dan hadirnya Campus Data Insight bukanlah akhir dari proses penguatan Satu Data Daerah. Tantangan berikutnya adalah memastikan data terus diperbarui, dimanfaatkan, dan menjadi bagian dari pengambilan keputusan sehari-hari, baik di lingkungan pemerintah maupun perguruan tinggi.

Kepala Bidang Statistik dan Informasi DKISP Kaltara Elstiven menekankan bahwa CDI membantu pemerintah daerah memperoleh umpan balik terhadap kualitas data. “Mahasiswa adalah mitra strategis. Melalui pemanfaatan E-Dataku, kami berharap lahir policy brief atau rekomendasi kebijakan yang segar dan kritis dari kampus,” ujarnya.

Elstiven menambahkan, penguatan CDI ke depan membutuhkan kerja lanjutan yang berdisiplin. Tantangan utamanya tidak hanya memastikan mahasiswa memiliki akses data, tetapi juga menjaga konsistensi kualitas analisis agar tidak berhenti pada narasi populer tanpa pijakan metodologi yang benar. Keberlanjutan program juga perlu ditopang sistem yang jelas, dari mekanisme pendampingan dosen dan pembina data, kesinambungan agenda lintas semester, hingga kesiapan OPD menerima mahasiswa magang dengan peran dan output yang terukur. Tanpa itu, CDI berisiko menjadi momentum sesaat, bukan kultur yang mengakar.

Pelaksanaan program ini tidak lepas dari dukungan Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri serta SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi

Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia-Indonesia. SKALA mendukung Provinsi Kaltara meningkatkan literasi data dan menghadirkan perspektif inklusi sosial, sehingga kebijakan berbasis data dapat makin menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Harapannya, CDI mampu mencetak agen-agen data yang mampu menjadi jembatan antara kebutuhan akademik dan kebutuhan tata kelola data pemerintah daerah, sehingga data yang tersedia benar-benar “hidup” sebagai bahan analisis, evaluasi, dan perbaikan kebijakan.

Melalui Campus Data Insight, Kalimantan Utara sedang membangun fondasi jangka panjang: ekosistem kebijakan yang tidak digerakkan oleh asumsi, tetapi oleh data yang kokoh, demi pembangunan yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat.





SKALA

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.



IFC Tower 2, Level 17

Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920



skala.or.id



<https://s.id/Channel-SKALA>